



RAKOR PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI GURU PPPK

**Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan**



Dukungan DAU untuk Penggajian PPPK TA 2023



Dukungan TKD (DAU) untuk Penggajian ASN Daerah

Dukungan penggajian melalui DAU hanya memperhitungkan ASN Daerah (PNS dan PPPK)

UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 79

- Gaji dan Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD

Pasal 101

- Gaji dan tunjangan untuk PPPK yang bekerja pada instansi Daerah dibebankan pada APBD



Dukungan penggajian melalui DAU hanya memperhitungkan ASN Daerah (PNS dan PPPK), **tidak termasuk pegawai non ASN**



PERHITUNGAN DAU PER DAERAH TA 2023



$$DAU = \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Celah Fiskal (CF)

=

Kebutuhan Fiskal

-

Potensi Pendapatan Daerah

$[\sum (UC_i \times \text{target layanan}_i) \times \text{faktor penyesuaian}] + \text{kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan}$

$\alpha_1 \text{ Potensi PAD} + \alpha_2 \text{ alokasi DBH} + \alpha_3 \text{ alokasi DAK Nonfisik}$

Satuan Biaya (UC)

Rerata 3 tahun Belanja Daerah sektor tertentu dibagi dengan rerata 3 tahun target layanan per masing-masing kelompok

X

Bidang

Bidang	Target Layanan
Pendidikan	Jumlah siswa sesuai kewenangan Prov. dan Kab./Kota
Kesehatan	Jumlah Penduduk
Pekerjaan Umum	Panjang jalan sesuai kewenangan Prov. dan Kab./Kota
Layanan Umum	Jumlah Penduduk

X

Faktor Penyesuaian

1. IKK
2. Density (JP/LW Darat)
3. Daerah Kepulauan (LW Laut)
4. Daerah Ketahanan Pangan (Pertanian dan perikanan)
5. Daerah Pariwisata
6. Daerah Konservasi Hutan

+

Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan

$\alpha_1 \times \text{Jumlah gaji ASN Daerah}$

Termasuk:
PNSD dan PPPK

Potensi PAD mempertimbangkan PDRB dan PAD tahun sebelumnya

Alokasi DBH dan DAK NF adalah alokasi t-1



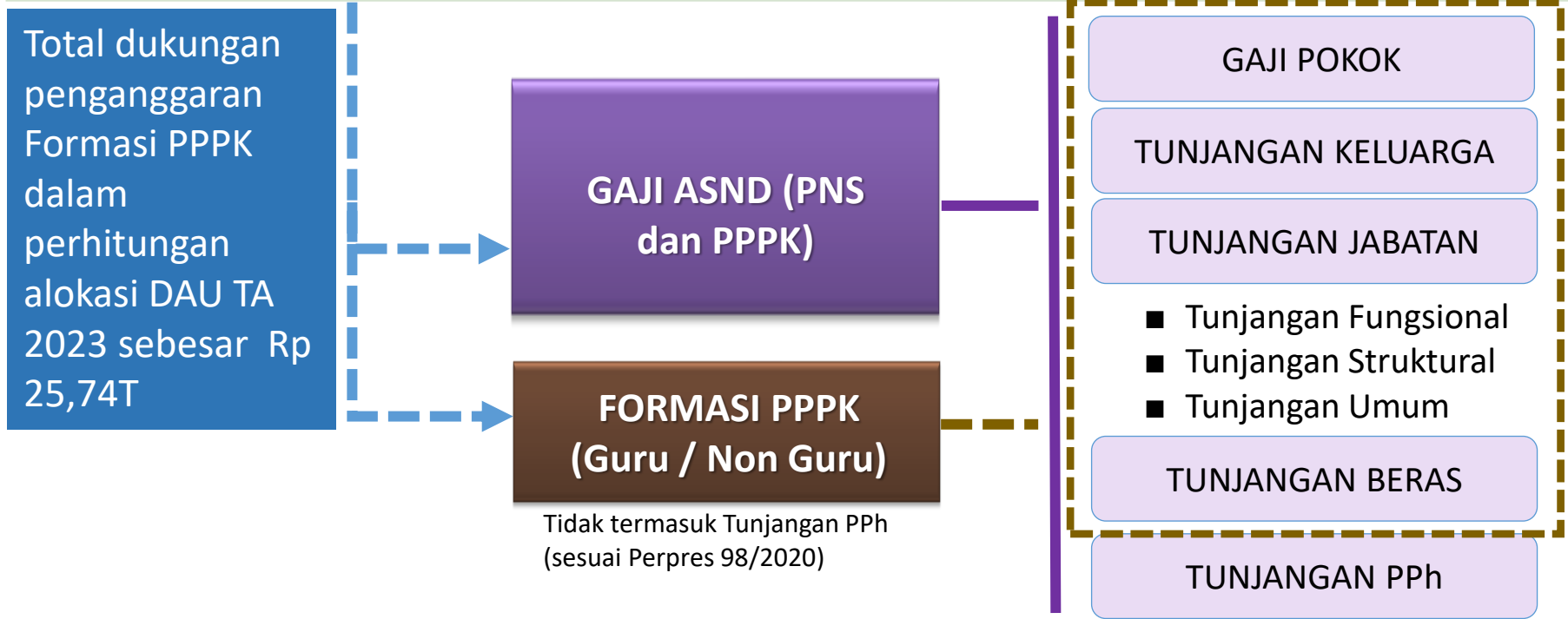
DUKUNGAN PENGANGGARAN PPPK DALAM DAU TA 2023

Alokasi dasar dalam formula DAU 2023 termasuk memperhitungkan formasi PPPK (gaji dan tunjangan melekat)

Kebutuhan Pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 126 ayat (1) UU No 1/2022)

Penghitungan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan memperhitungkan antara lain kebutuhan penggajian aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK.:

- Kebijakan Gaji Ke-13
- Kebijakan THR
- Kebijakan Formasi PPPK





Perkiraan Kebutuhan ASND 2022-2023

Perkiraan kebutuhan ASN Daerah masih cukup tinggi pada tahun 2022-2023

Uraian	Kebutuhan ASN Daerah*					
	2022			2023		
	Guru	Nakes	Teknis	Guru	Nakes	Teknis
Sub Total	758.018	255.249	41.009	686.626	201.438	28.045
Total	1.054.276			916.109		

*Catatan: Berdasarkan surat MENPAN_RB Nomor B/1766/SM.01.00/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Data Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2022 dan Tahun 2023



Uraian	Kebutuhan ASN Daerah** (Direvisi setelah ada usulan daerah)					
	2022			2023		
	Guru	Nakes	Teknis	Guru	Nakes	Teknis
Sub Total	320.223	92.151	27.594	686.626	201.438	28.045
Total	439.968			916.109		

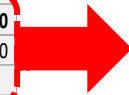
*Catatan: Berdasarkan surat MENPAN_RB Nomor B/1842/SM.01.00/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Data Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2022 dan Tahun 2023



Pengaturan Penggajian PPPK dalam APBN



Uraian	2020			2021		
	Alokasi Perpres 72/2020	Realisasi	% thd Perpres 72/2020	Alokasi Refocussing	Realisasi	% thd Alokasi Refocussing
Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763.925,6	762.530,2	99,8	795.838,8	785.707,5	98,7
A. Transfer ke Daerah	692.735,6	691.429,7	99,8	723.838,8	713.853,8	98,6
1. Dana Perimbangan	653.358,9	652.097,6	99,8	689.535,8	679.586,6	98,6
a. Dana Transfer Umum	470.800,2	475.518,8	101,0	495.112,3	494.948,4	100,0
1) Dana Bagi Hasil	86.418,7	93.906,4	108,7	117.320,9	117.157,0	99,9
Dana Bagi Hasil Pajak	44.876,0	29.340,7	65,4	43.496,3	43.352,1	99,7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	29.038,2	25.000,9	86,1	27.521,7	27.502,0	99,9
Dana Bagi Hasil Kurang Bayar	12.504,5	20.564,8	216,4	46.302,9	46.302,0	100,0
2) Dana Alokasi Umum	384.381,5	381.612,5	99,3	377.791,4	377.791,4	100,0
Dana Alokasi Umum	377.763,9	377.763,9	100,0	377.791,4	377.791,4	100,0
DAU Tambahan	6.617,6	3.848,6	58,2			
b. Dana Transfer Khusus	182.558,7	176.578,8	96,7	194.423,5	184.638,2	95,0
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	53.787,4	50.176,0	93,3	63.648,2	57.069,7	89,7
2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128.771,3	126.402,9	98,2	130.775,3	127.568,6	97,5
2. Dana Insentif Daerah	18.500,0	18.455,3	99,8	13.500,0	13.464,3	99,7
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta	20.876,7	20.876,7	100,0	20.802,9	20.802,9	100,0
a. Dana Otonomi Khusus	19.556,7	19.556,7	100,0	19.482,9	19.482,9	100,0
1) Dana Otonomi Khusus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	7.555,3	7.555,3	100,0	7.555,8	7.555,8	100,0
2) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555,3	7.555,3	100,0	7.555,8	7.555,8	100,0
3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus	4.446,2	4.446,2	100,0	4.371,3	4.371,3	100,0
b. Dana Keistimewaan DIY	1.320,0	1.320,0	100,0	1.320,0	1.320,0	100,0
B. Dana Desa	71.190,0	71.100,5	99,9	72.000,0	71.853,7	99,8



URAIAN	Realisasi				RUU APBN (Nota Keuangan) 2023	RUU APBN (Penyesuaian) 2023
	2019	2020	2021	2022		
1. Dana Bagi Hasil	103.98	93.91	117.16	140.43	136.26	136.26
2. Dana Alokasi Umum	420.91	381.61	377.79	378.00	396.00	396.00
- DAU tidak ditentukan penggunaannya			377.79	378.00	286.77	286.77
- DAU ditentukan penggunaannya :					109.23	109.23
▪ Penggajian Formasi PPPK					25.74	25.74
▪ Pendanaan Kelurahan					1.67	1.67
▪ Pendanaan Layanan Publik					81.82	81.82
3. Dana Alokasi Khusus	186.40	176.58	184.64	189.59	182.90	185.90
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	64.17	50.18	57.07	60.87	50.52	53.52
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	122.23	126.40	127.57	128.72	130.30	130.30
c. Hibah ke Daerah	-	-	-	-	2.08	2.08
4. Dana Otonomi Khusus	20.98	19.56	19.48	20.44	17.24	17.24
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.20	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
6. Dana Desa	69.81	71.10	71.85	68.00	70.00	70.00
7. Insentif Fiskal	9.69	18.46	13.46	7.00	8.00	8.00
TOTAL TKD	812.97	762.54	785.70	804.78	811.72	814.72

- Dalam APBN TA 2023, DAU Penggajian Formasi PPPK akan masuk dalam akun khusus
- Akan di salurkan ke daerah, apabila telah terdapat pengangkatan formasi



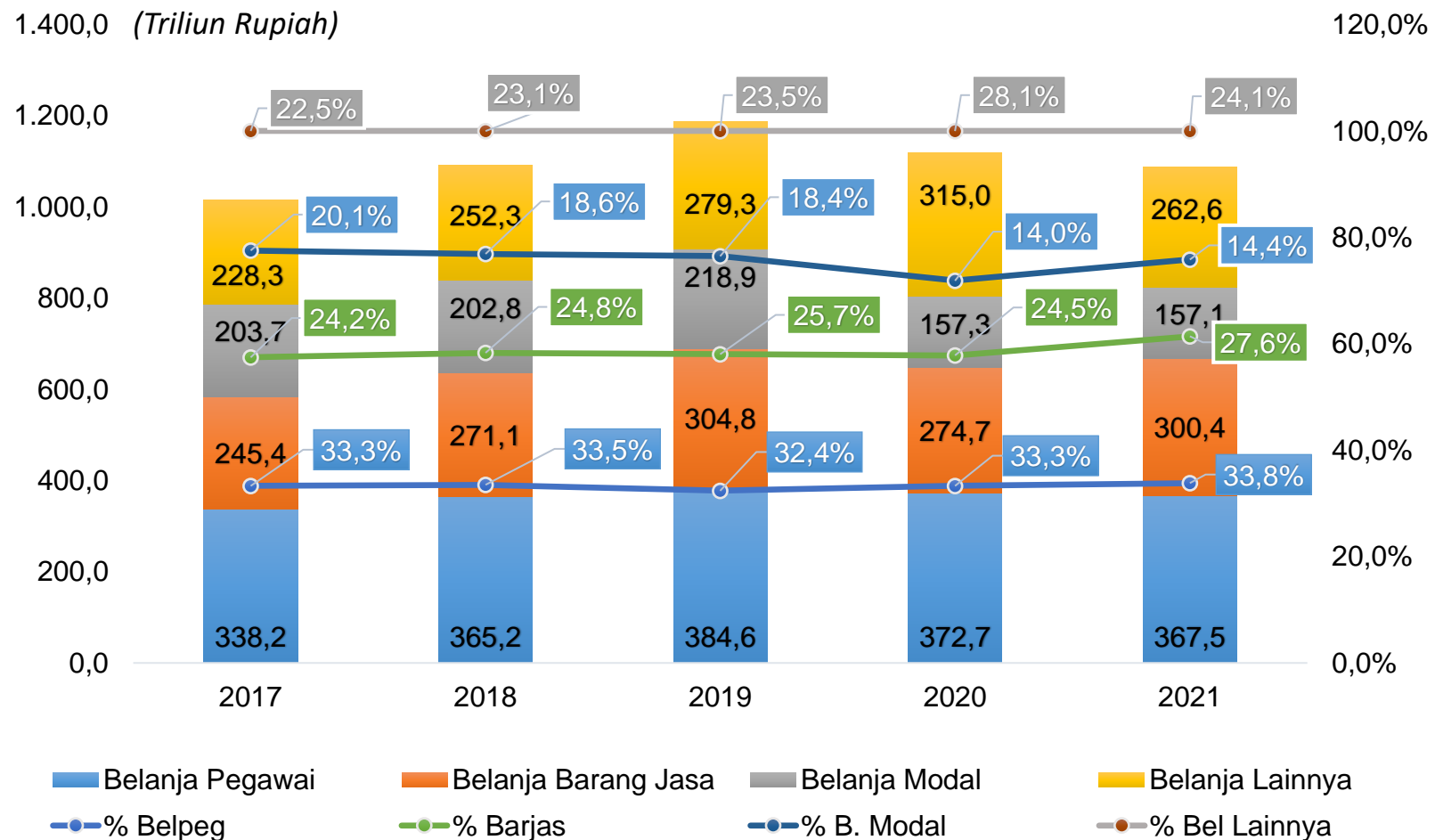
2. Belanja Pegawai



PENGANGGARAN BELANJA DAERAH KOMPOSISINYA BELUM IDEAL



Belanja pegawai masih menjadi **komponen belanja terbesar** dalam APBD selama 5 tahun terakhir. Sementara itu **Belanja Modal** perlu mendapat perhatian yang lebih karena **proporsinya paling kecil**.



Sumber: SIKD DJPK (diolah)

- Dilihat dari proporsi per jenis belanja, **belanja pegawai merupakan belanja dengan proporsi terbesar (rata-rata 33,2%)** dari seluruh komponen belanja.
- **Belanja barang/jasa menunjukkan tren yang meningkat.** Pertumbuhan belanja barang/jasa pada 2021 yaitu sebesar 22,4% dibandingkan tahun 2017.
- **Proporsi belanja lainnya secara rata-rata 24,3%.** pada awal pandemi covid tahun 2020 belanja lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 4,6% dibandingkan th 2019. Meskipun pada tahun 2021 turun kembali menjadi 24,1%.
- **Belanja modal** merupakan belanja yang perlu mendapatkan perhatian karena selain proporsinya paling kecil, secara nominal juga mengalami penurunan. **Secara rata-rata proporsinya hanya sebesar 17,1%.**



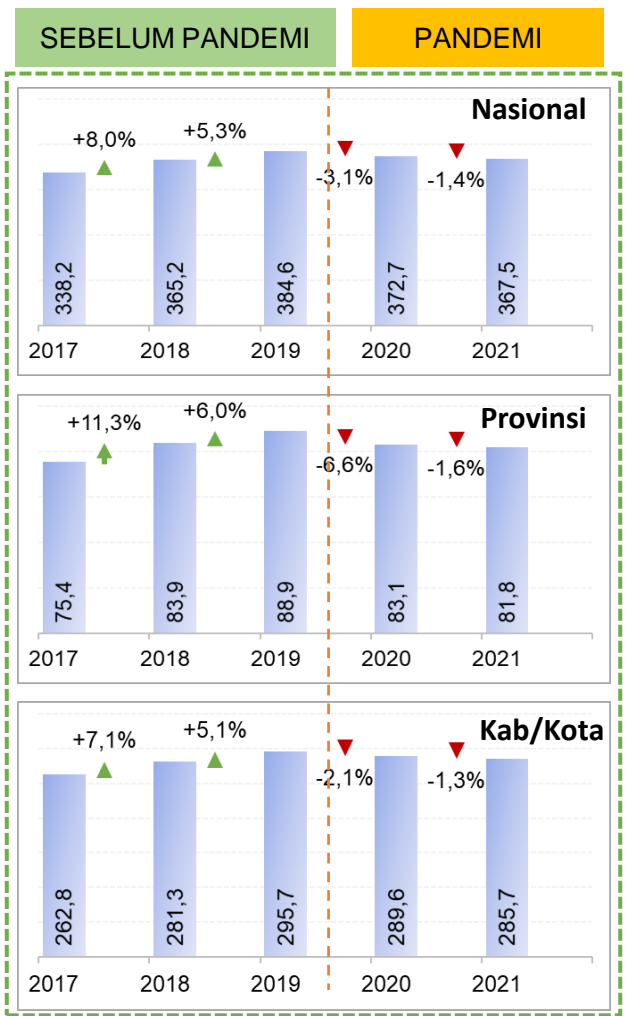


PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TA 2017 – 2021 PER WILAYAH PULAU

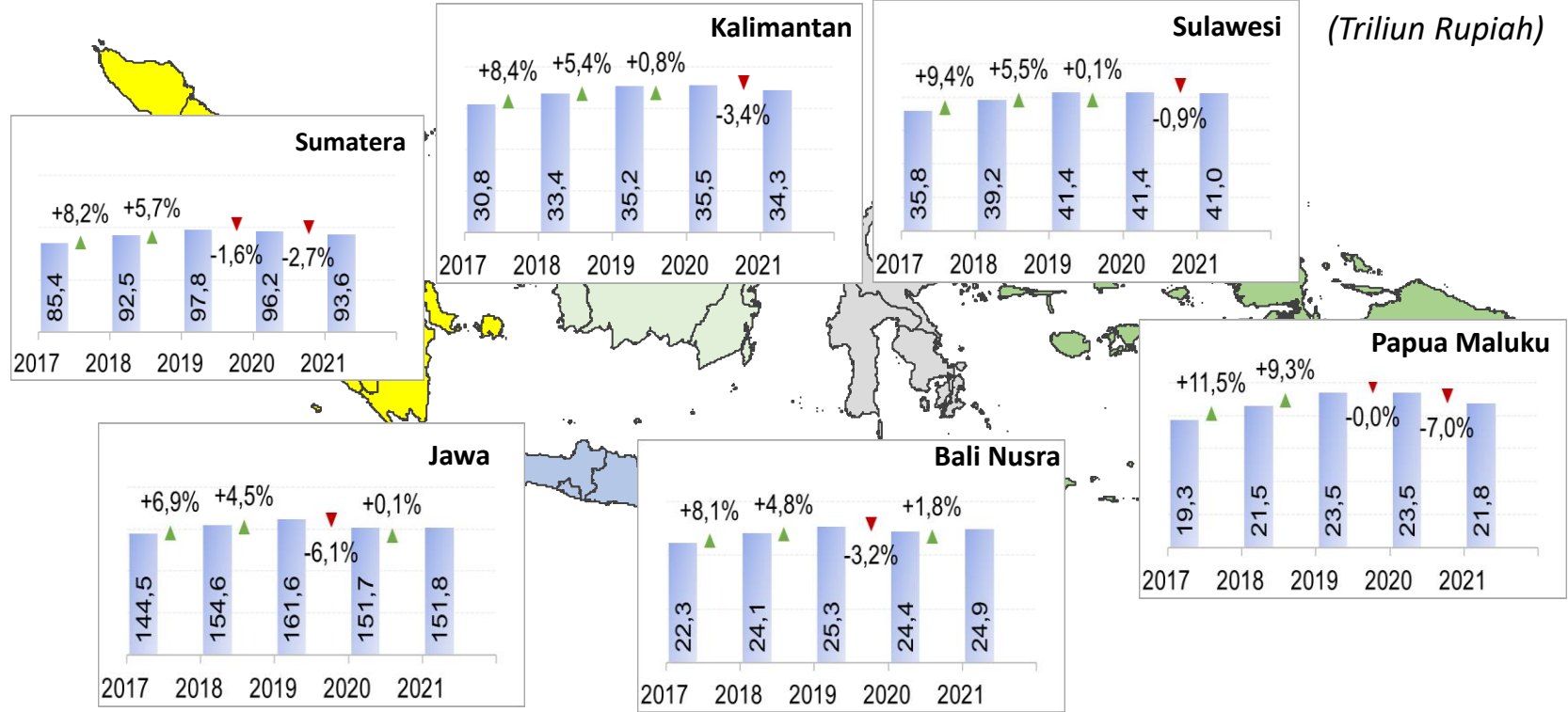


Belanja pegawai di semua wilayah Indonesia sempat mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19, namun porsinya masih cukup besar

NASIONAL



PERKEMBANGAN BELANJA PEGAWAI PER WILAYAH



- Belanja pegawai sebelum pandemi covid secara nasional tumbuh positif. **Pada masa pandemi covid belanja pegawai mengalami pertumbuhan negatif -3,1% pada 2020 dan -1,4% pada 2021.** Pada 2021 belanja pegawai di tingkat provinsi masih tumbuh -1,6% sementara di tingkat kab/kota juga masih tumbuh negatif -1,3%.
- Pada awal pandemi tahun 2020, wilayah Jawa mengalami penurunan terbesar yaitu -6,1%. Pada tahun 2021 wilayah Papua-Maluku yang mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -7%.
- **Pada tahun 2021 belanja pegawai di wilayah Jawa dan Bali Nusra** kembali menunjukkan pertumbuhan positif meskipun secara nominal masih dibawah saat sebelum pandemi covid.

Sumber: SIKD DJPK (diolah)

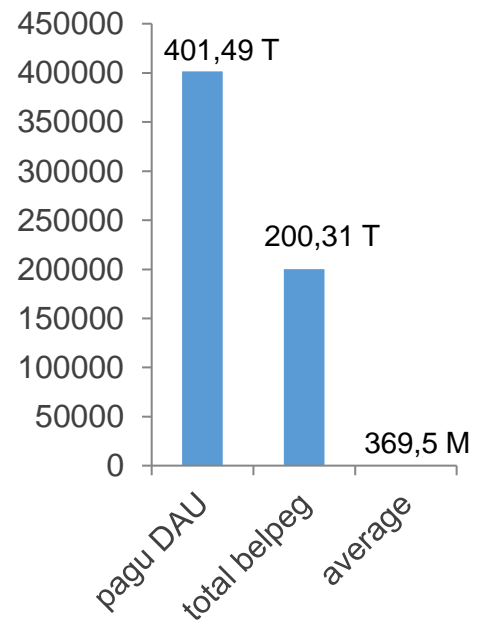


Belanja Pegawai dalam Perhitungan DAU

Total belanja pegawai dalam perhitungan alokasi DAU masih cukup tinggi berkisar 200-222T dari pagu DAU yang berkisar 377-421 T

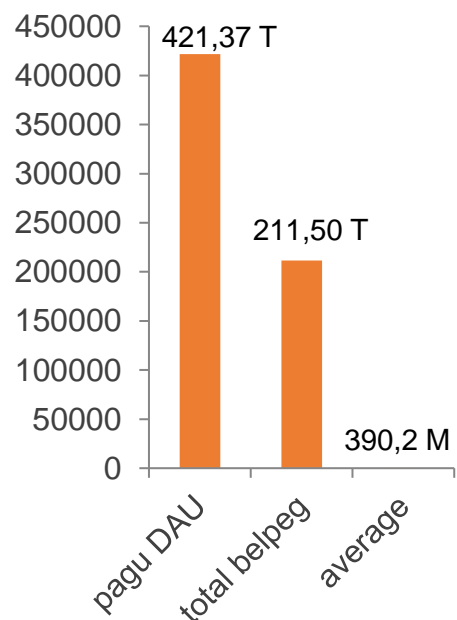


Gaji pokok, Tunjangan melekat dan formasi ASND (dalam miliar rupiah)



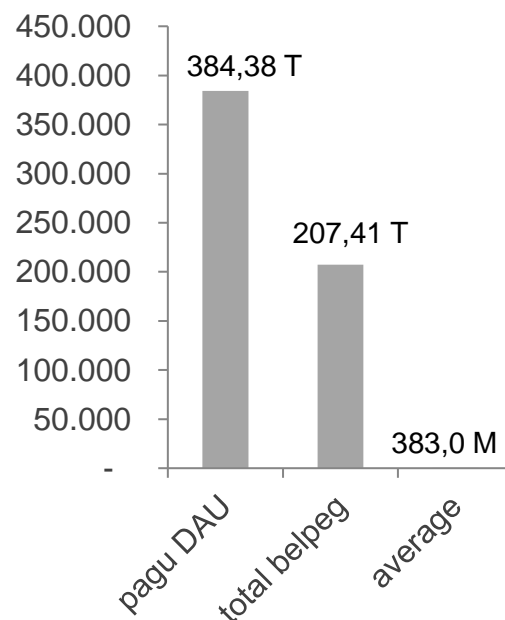
TA 2018

Total belanja pegawai dalam perhitungan alokasi DAU sebesar Rp200,31 T (49,9%) dari pagu DAU



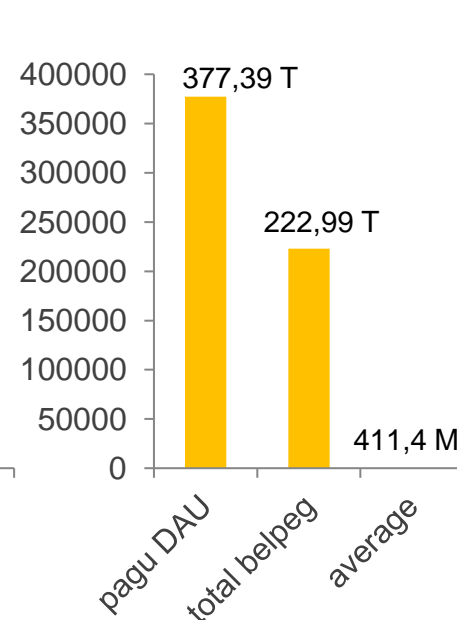
TA 2019

Total belanja pegawai dalam perhitungan alokasi DAU sebesar Rp211,5 T (50,2%) dari pagu DAU



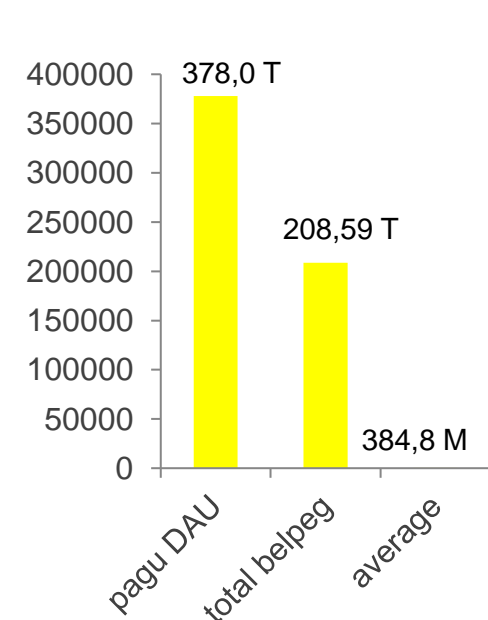
TA 2020

Total belanja pegawai dalam perhitungan alokasi DAU sebesar 207,4 T (54,0%) dari pagu DAU



TA 2021

Total belanja pegawai dalam perhitungan alokasi DAU sebesar 222,9 T (59,1%) dari pagu DAU



TA 2022

Total belanja pegawai dalam perhitungan alokasi DAU sebesar 208,59 T (55,2%) dari pagu DAU

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Belanja Pegawai dalam perhitungan alokasi DAU bersifat fluktuatif , dan cenderung stagnan (rata-rata pertumbuhan pertahun Belanja Pegawai untuk perhitungan alokasi DAU sebesar 1.02%)



STRATEGI KE DEPAN: MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA, LAYANAN PUBLIK, DAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI

Peningkatan kualitas belanja, layanan publik, dan inovasi daerah, serta penerapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan alokasi APBD yang efisien, efektif, akuntabel, serta berorientasi pada layanan publik

STRATEGI KE DEPAN

1. MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA & LAYANAN PUBLIK

- Penguatan **disiplin & sinergi belanja** daerah
- Memulai digitalisasi layanan publik
- TKD **diarahkan** untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- APBD agar lebih fokus pada kegiatan yang mendukung aksesibilitas bidang **Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi**.
- Peningkatan kapasitas SDM Daerah
- Penguatan pengawasan internal di daerah

2. PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI

- Inovasi layanan publik digital
- *Right-sizing* pada organisasi dan ASN
- Meningkatkan produktivitas dan integritas ASN,
- Reward and punishment untuk birokrasi yang efisien dan berintegritas
- Penerapan merit system dalam rekrutmen dan karier ASN